

## BAB V

### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

#### A. KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai Program *Car Free Day* di Kota Bogor ini menunjukkan bahwa implementasi program tersebut belum efektif. Secara substansial program ini juga belum optimal dalam mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor. Penjabarannya adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Program *Car Free Day* Kota Bogor.

- a. Ketepatan Kebijakan

Data hasil Pengujian Kualitas Udara (PKU) yang dilakukan oleh BPLH menunjukkan bahwa kandungan polutan di Kota Bogor masih berada di bawah baku mutu dan tidak terdapat penurunan kandungan polutan secara konsisten pada udara ambien selama program ini berjalan, sehingga tujuan program ini sebagai solusi dalam mengatasi masalah pencemaran udara yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor tidak tercapai. Tujuan program sebagai bahan edukasi dalam efisiensi penggunaan kendaraan pribadi juga tidak tercapai, karena kecenderungan masyarakat dalam menggunakan kendaraan pribadi justru semakin tinggi. Hal-hal tersebut menunjukkan ketepatan kebijakan program ini masih lemah.

#### b. Ketepatan Pelaksana

Program CFD merupakan bagian dari program sektor transportasi darat dalam menggalakkan RAN-GRK, dan seharusnya dilaksanakan oleh DLLAJ. Di Kota Bogor program ini justru dilaksanakan oleh Satlantas Polres Bogor Kota yang sebenarnya lebih berfokus kepada pengaturan serta pendidikan dan pengayoman lalu lintas kepada masyarakat. Secara teknis, tidak ada koordinasi dengan DLLAJ pada saat pelaksanaan, dan petugas yang turun ke lapangan didominasi oleh petugas Satlantas Polres. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa ketepatan pelaksana program ini masih lemah.

#### c. Ketepatan Target

Sejauh ini UU. No. 22 Tahun 2009 pasal 127, 128, dan 129 sebagai pedoman bagi Satlantas Polres dalam melaksanakan CFD telah diimplementasikan dengan baik oleh petugas. Target yang merupakan pengguna kendaraan bermotor juga telah diintervensi dengan baik dan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan. Awalnya masyarakat yang menjadi target (pengguna kendaraan bermotor) merasa kesulitan untuk melintas di jalur alternatif karena memakan waktu yang lebih lama, namun pada saat ini target bisa menerima kebijakan tersebut. Di sisi lain masyarakat pengunjung CFD sangat mendukung kegiatan ini. Dengan dukungan positif dari masyarakat dan target yang telah diintervensi dengan baik, maka program CFD Kota Bogor memiliki ketepatan target yang kuat.

#### d. Ketepatan Lingkungan

Satlantas Polres Bogor Kota merupakan salah satu unsur dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor. Forum ini merupakan forum multi sektoral yang bertugas untuk mengkaji permasalahan lalu lintas dan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh lalu lintas. Akan tetapi sampai saat ini forum tersebut belum menjadikan CFD sebagai sebuah program, sehingga koordinasi belum maksimal. Dilihat dari instansi-instansi yang terlibat, *network composition* (komposisi jejaring) forum ini sebenarnya cukup kuat, namun Satlantas Polres belum memaksimalkan perannya untuk melakukan koordinasi yang terkait dengan CFD. Tidak adanya koordinasi yang khusus membahas CFD antara Satlantas Polres dengan instansi lain menyebabkan program ini tidak sepenuhnya efektif, sehingga ketepatan lingkungan kebijakannya sendiri bisa dikatakan lemah.

Sejauh ini opini masyarakat mengenai program ini masih positif, walaupun terdapat beragam interpretasi mengenai program ini. Beberapa masyarakat yang mengunjungi area CFD memberikan dukungan terhadap program ini, sedangkan BPLH sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap permasalahan lingkungan menganggap program ini kurang efektif jika dilaksanakan dengan alasan untuk mengurangi dampak negatif dari asap kendaraan bermotor.

## 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program *Car Free Day*

Keefektifan implementasi program *Car Free Day* dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

#### a. Komunikasi

Proses komunikasi horizontal antara Satlantas Polres dan juga instansi lain belum efektif. Hal ini dilihat dari belum adanya koordinasi antara Satlantas Polres dengan instansi lain seperti DLLAJ dan juga BPLH. Komunikasi vertikal ke bawah dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh Satlantas Polres saat ini belum efektif. Sosialisasi yang lemah menyebabkan munculnya beragam interpretasi dari masyarakat mengenai tujuan program ini. Ketidakefektifan sosialisasi menyebabkan kecenderungan masyarakat dalam menggunakan kendaraan pribadi masih tinggi, yang menunjukkan bahwa tujuan CFD sebagai bahan edukasi kepada masyarakat dalam efisiensi penggunaan kendaraan pribadi tidak tercapai. Dengan demikian, faktor komunikasi mempengaruhi aspek ketepatan kebijakan dan juga ketepatan lingkungan.

#### b. Sumberdaya

Sumberdaya yang dimiliki oleh Satlantas Polres berpengaruh pada kinerja petugas di lapangan. Hal ini dapat dilihat dari kualitas maupun kuantitas sumberdaya manusia yang dimiliki Satlantas Polres dalam pelaksanaan program ini. Fasilitas yang digunakan oleh petugas pada dasarnya juga telah mencukupi dan mendukung kinerja petugas di lapangan, sehingga petugas dapat menangani permasalahan yang ada di lapangan. Prosedur pengalihan arus lalu lintas dapat ditangani dengan baik, sehingga target yang merupakan pengguna kendaraan bermotor dapat

diintervensi dengan baik. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa faktor sumberdaya berpengaruh pada aspek ketepatan target.

### c. Struktur Birokrasi

Pengaruh struktur birokrasi pada implementasi program ini berkaitan dengan koordinasi. Lemahnya koordinasi antara Satlantas dan instansi lain disebabkan karena program ini belum memiliki SOP yang khusus menjabarkan prosedur mengenai CFD. Program ini belum dijabarkan secara rinci dalam bentuk peraturan daerah ataupun peraturan walikota. Selama ini Satlantas Polres hanya berpedoman pada pasal 127, 128, dan 129 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai petunjuk pelaksanaan. Undang-undang tersebut pada dasarnya hanya sebatas otorisasi bagi Satlantas Polres dalam melakukan pengalihan arus lalu lintas dan tidak menjelaskan teknis pelaksanaan program CFD. Dengan demikian, struktur birokrasi dalam implementasi program ini mempengaruhi aspek ketepatan lingkungan.

## B. IMPLIKASI

Implikasi hasil penelitian mengenai evaluasi implementasi Program *Car Free Day* di Kota Bogor ini adalah:

1. Proses implementasi program CFD Kota Bogor pada dasarnya belum efektif. Secara substansial program ini juga belum mampu mengurangi dampak negatif yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor, dan belum bisa mengubah kecenderungan masyarakat dalam menggunakan kendaraan pribadi. Sehingga bisa dikatakan program ini belum optimal

dalam mencapai tujuannya. Kendala dan hambatan dalam program ini diantaranya adalah belum adanya peraturan khusus mengenai CFD sebagai dasar pelaksanaan program ini. Koordinasi antara Satlantas Polres Bogor Kota dengan instansi lain belum maksimal. Sosialisasi mengenai program ini tidak efektif, sehingga masyarakat belum memahami substansi CFD, dan pada akhirnya tujuan yang diinginkan program tersebut belum bisa tercapai.

2. Faktor komunikasi dan struktur birokrasi mempengaruhi ketidakefektifan implementasi program CFD di Kota Bogor. Komunikasi secara horizontal antara Satlantas Polres dengan instansi lain belum terjalin, sehingga menyebabkan koordinasi belum dapat terbentuk. Komunikasi vertikal ke bawah dalam bentuk sosialisasi saat ini pun belum efektif. Hal ini menyebabkan masyarakat belum memahami tujuan maupun substansi program ini. Lemahnya sosialisasi pada akhirnya menyebabkan tujuan program ini belum tercapai. Struktur birokrasi program ini juga berkaitan dengan koordinasi antar instansi. Koordinasi antar instansi yang belum dapat terbentuk disebabkan oleh belum adanya kebijakan teknis mengenai pelaksanaan program ini.

Adapun hal-hal yang dapat dilakukan untuk membenahi hambatan-hambatan tersebut adalah:

1. Sosialisasi harus kembali dilakukan oleh Satlantas agar masyarakat memahami tujuan program ini, salah satunya dengan cara menyediakan sarana komunikasi khusus untuk menjelaskan tujuan-tujuan yang ingin

dicapai dari CFD dan memberikan informasi secara berkala melalui media tersebut. Contohnya dengan membuat akun jejaring sosial tersendiri atau situs internet yang dikhususkan hanya untuk menginformasikan pelaksanaan CFD di Kota Bogor.

2. Satlantas Polres Bogor Kota selaku pelaksana harus bekerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi yang terkait untuk segera menyusun instruksi tertulis mengenai CFD, baik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) ataupun Peraturan Walikota (Perwali). Dengan adanya instruksi tertulis tersebut, maka diharapkan koordinasi dapat terjalin dengan maksimal. Hal lainnya adalah dengan cara menjadikan CFD sebagai sebuah program dari Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor. Dengan cara ini diharapkan koordinasi lintas sektoral dapat dilakukan, sehingga program akan terhubung dengan program-program lain yang terkait dengan penanganan dampak lalu lintas.